



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 46 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 651/II/2019 tentang Penerima Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 perlu ditindaklanjuti ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan objek belanja dalam jenis belanja dengan melakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk untuk belanja keperluan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 4047 A /DISDIKBUD/VII/2019 Perihal Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan TA.2019, perlu ditindaklanjuti;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD-Sekre/703 Perihal Permintaan Perubahan Kode Rekening, perlu ditindaklanjuti;
- f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 870/DPOP/VII/2019/262.1 Perihal Usulan Perubahan nomenklatur pekerjaan dalam kegiatan di Disporapa Kab. Inhu pada Perubahan Penjabaran APBD TA. 2019, perlu ditindaklanjuti;
- g. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD-Sekre/704 Perihal Perubahan Anggaran Kas Dana Bantuan Partai Politik TA 2019, perlu ditindaklanjuti;
- h. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD tanggal 17 Juli 2019 tentang Perubahan Penjabaran Ke-4 (Empat) APBD TA 2019, disepakati bahwa perlu dilakukan perubahan keempat penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

40. Peraturan ...

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

- (1) Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan:
 1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 16);
 2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
 3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 31);diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, Peraturan Bupati ini.

(2) Pada...

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 16);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

| PARAF KOORDINASI | | PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|-----|-----------------------------|--|
| KARAG HUKUM | day | KEPALA DINAS | |
| KEPALA BAGIAN..... | | KEPALA BADAN/INSPEKTUR | |
| KEPALA BAGIAN..... | | KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD | |

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 19 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 46

[Handwritten signature]

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH,
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

| No. | Uraian | Jumlah | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 4 | PENDAPATAN | 1.284.094.016.807,00 | 1.605.315.930.807,00 | 321.221.914.000,00 | 25,02 |
| 41 | Pendapatan Asli Daerah | 111.185.051.276,00 | 111.185.051.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Pajak Daerah | 33.448.748.536,00 | 33.448.748.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41101 | Pajak Hotel | 382.605.537,00 | 382.605.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110109 | Hotel Melati Satu | 139.845.537,00 | 139.845.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110112 | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos | 242.760.000,00 | 242.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41102 | Pajak Restoran | 3.128.421.275,00 | 3.128.421.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110201 | Restoran | 420.728.227,00 | 420.728.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110202 | Rumah Makan | 643.853.666,00 | 643.853.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110203 | Kafetaria | 122.322.759,00 | 122.322.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110204 | Kantin | 138.897.962,00 | 138.897.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110205 | Katering | 1.802.618.661,00 | 1.802.618.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41103 | Pajak Hiburan | 77.957.275,00 | 77.957.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110307 | Karaoke | 13.918.783,00 | 13.918.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110310 | Permainan Bilyar | 3.121.200,00 | 3.121.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110319 | Pertandingan Olahraga | 60.917.292,00 | 60.917.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41104 | Pajak Reklame | 1.076.546.914,00 | 1.076.546.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110401 | Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 493.797.337,00 | 493.797.337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110402 | Reklame Kain | 383.133.074,00 | 383.133.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110403 | Reklame Melekat/Stiker | 33.245.635,00 | 33.245.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110404 | Reklame Selebaran | 165.034.134,00 | 165.034.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110405 | Pajak Reklame Berjalan | 1.336.734,00 | 1.336.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41105 | Pajak Penerangan Jalan | 16.587.804.215,00 | 16.587.804.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110501 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 14.901.677.520,00 | 14.901.677.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110502 | Pajak Penerangan Jalan Non PLN | 1.686.126.695,00 | 1.686.126.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41107 | Pajak Parkir | 49.440.000,00 | 49.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110701 | Pajak Parkir | 49.440.000,00 | 49.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41108 | Pajak Air Tanah | 54.590.000,00 | 54.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110801 | Pajak Air Tanah | 54.590.000,00 | 54.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41109 | Pajak Sarang Burung Walet | 180.250.000,00 | 180.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110901 | Pajak Sarang Burung Walet | 180.250.000,00 | 180.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41111 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 529.633.320,00 | 529.633.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111101 | Kerikil Berpasir Alami (Sertu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111104 | Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111106 | Pasir dan Batu | 70.023.595,00 | 70.023.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111107 | Kerikil | 187.734.506,00 | 187.734.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111108 | Tanah Uruk / Timbunan | 271.875.219,00 | 271.875.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41112 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 5.459.000.000,00 | 5.459.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111201 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 5.459.000.000,00 | 5.459.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111202 | Penerimaan Piutang PEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41113 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 5.922.500.000,00 | 5.922.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111301 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 5.922.500.000,00 | 5.922.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Retribusi Daerah | 4.306.584.000,00 | 4.306.584.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41201 | Retribusi Jasa Umum | 2.144.404.000,00 | 2.144.404.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120102 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 294.888.000,00 | 294.888.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120105 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 480.000.000,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120106 | Retribusi Pelayanan Pasar | 736.116.000,00 | 736.116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120107 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 633.400.000,00 | 633.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120111 | Retribusi Penyediaan dan/ atau penyedotan kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120114 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No. | Uraian | Jumlah | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5232711 | Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 |
| 5232712 | Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Kebudayaan | 0,00 | 2.912.000,00 | 2.912.000,00 | 0,00 |
| 5232713 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum | 0,00 | 46.700.000,00 | 46.700.000,00 | 0,00 |
| 5232714 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial | 0,00 | 16.680.000,00 | 16.680.000,00 | 0,00 |
| 5232715 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan | 0,00 | 3.190.000,00 | 3.190.000,00 | 0,00 |
| 5232716 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 0,00 | 17.270.000,00 | 17.270.000,00 | 0,00 |
| 5232718 | Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 |
| 5232719 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan | 0,00 | 2.912.000,00 | 2.912.000,00 | 0,00 |
| 5232720 | Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan | 0,00 | 2.464.000,00 | 2.464.000,00 | 0,00 |
| 52328 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | 116.525.000,00 | 116.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5232808 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesenian | 116.525.000,00 | 116.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52330 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan | 254.500.000,00 | 254.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5233008 | Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Peluru | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5233010 | Belanja Modal Pengadaan Helm | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5233012 | Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52331 | Belanja Modal Dana BOS 6 | 0,00 | 13.155.316.507,00 | 13.155.316.507,00 | 0,00 |
| 5233101 | Belanja Modal Dana BOS | 0,00 | 13.155.316.507,00 | 13.155.316.507,00 | 0,00 |
| 52332 | Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah | 0,00 | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | 0,00 |
| 5233201 | Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah PAUD | 0,00 | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | 0,00 |
| 52333 | Belanja Modal pada BLUD | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5233301 | Belanja Modal pada BLUD | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52335 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan | 145.549.950,00 | 145.549.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5233501 | Belanja Modal Rambu-rembu Jalan | 145.549.950,00 | 145.549.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52336 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga | 221.626.000,00 | 221.626.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5233601 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga | 221.626.000,00 | 221.626.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1,338,383,677,161,00 | 1,659,605,591,161,00 | | |
| | SURPLUS/DEFISIT | (54.289.660.354,00) | (54.289,660,354,00) | | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 61 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 54.289.660.354,00 | 54.289.660.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 54.289.660.354,00 | 54.289.660.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61104 | Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya | 54.289.660.354,00 | 54.289.660.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6110412 | Lain-lain (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya) | 54.289.660.354,00 | 54.289.660.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 54,289,660,354,00 | 54,289,660,354,00 | | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | | |

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | | PARAF KOORDINASI | |
| KARAS HUKUM | <i>bley</i> | KEPALA DINAS | |
| KEPALA BAGIAN..... | | KEPALA BADAN/INSPEKTUR | |
| KEPALA BAGIAN..... | | KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD | |

PERUBAHAN PENJABARAN APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Organisasi : 2.01 - PENDIDIKAN
 Organisasi : 2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 46 Tahun 2019
 TANGGAL : 9 Juli 2019

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) | | SUMBER DANA | DASAR HUKUM | PENJELASAN |
|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|----------------|------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.1.4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.1.4.10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dana Alokasi Umum | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.1.4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dana Alokasi Umum | | Tetap |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.1.4.18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dana Alokasi Umum | | Tetap |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.3.1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dana Alokasi Umum | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.01.4.3.1.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dana Alokasi Umum | | Tetap |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.02.5.1 | 223,852,294,263.74 | 312,907,905,263.74 | 89,055,611,000.00 | 39.78 | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.02.5.1.1 | 223,852,294,263.74 | 312,907,905,263.74 | 89,055,611,000.00 | 39.78 | | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.02.5.1.1.01 | 200,989,444,263.74 | 200,989,444,263.74 | 0.00 | 0.00 | Dana Alokasi Umum | | |
| 2.01 | 2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.01 | 155,991,623,243.00 | 155,991,623,243.00 | 0.00 | 0.00 | Dana Alokasi Umum | | Tetap |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | Rp | Bertambah/ (Berkurang) | | SUMBER DANA | DASAR HUKUM | PENJELASAN | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------|----------------|----------------|------------|--|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | % | % | | | | |
| 5.02 | 5.02.01.00 | 02 | 02 | 5 | 2 | 2 | 28 | | | |
| | Belanja Biaya Pendukung | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APBD Kabupaten | | Tetap | |
| | Administrasi | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APBD Kabupaten | | | |
| | Belanja Jasa Pendukung Kegiatan | | | | | | | | | |
| 5.02 | 5.02.01.00 | 02 | 02 | 5 | 2 | 2 | 28 | | | |
| | BELANJA DAERAH | 287,472,420,692.39 | 288,723,720,692.39 | 1,251,300,000.00 | 0.44 | 0.00 | | | | |
| | PEMBIAYAAN DAERAH | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5.02 | 5.02.01.00 | 00 | 00 | 03 | 6 | 1 | 1 | | | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5.02 | 5.02.01.00 | 00 | 03 | 6 | 1 | 1 | 04 | | | |
| | Sisa Penghematan Belanja atau akdbat lainnya | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | Tetap | |
| 5.02 | 5.02.01.00 | 00 | 03 | 6 | 1 | 1 | 04 | | | |
| | Lain-lain (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya) | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 54,289,660,354.00 | 0.00 | | | | |

RUPATI INDRAGIRI HULU

H. YUPI ARIANTO

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|----------|
| PARAF KORDINASI | | PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | <i>bky</i> | KEPALA DINAS | |
| KEPALA BAWAH | | KEPALA BADAN/INSPEKTUR | <i>✓</i> |
| KEPALA BAKOR | | KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD | |